

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN TWA GUNUNG TUNAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE MANAGEMENT OF MOUNT TUNAK NATURE TOURISM PARK, CENTRAL LOMBOK DISTRICT

Muhamad Ari Rahman^{1*}, Hairil Anwar¹, dan Endah Wahyuningsih¹

¹Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

*e-mail: arygareth5@gmail.com

ABSTRACT

The management of the Gunung Tunak Nature Tourism Park (TWA) requires collaboration among various stakeholders to achieve sustainable conservation and development. This study aims to identify stakeholders, analyze their influence and interests, and examine partnership patterns in the management of TWA Gunung Tunak. A descriptive method was employed in this research, using purposive sampling to select respondents. Data analysis utilized stakeholder analysis to evaluate the roles and relationships among actors. The results indicate the involvement of six key stakeholders in managing TWA Gunung Tunak: the West Nusa Tenggara Natural Resources Conservation Agency (BKSDA NTB), the Tourism Office of Central Lombok Regency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Central Lombok, the Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), the Mertak Village Government, and the Tunak Besopoq Group. Analysis revealed that BKSDA NTB and KIFC have very high levels of influence and interest in the management process, while the Tunak Besopoq Group exhibits high levels. In contrast, the Tourism Office, Bappeda Central Lombok, and Mertak Village Government display lower levels of influence and interest. The identified partnership patterns adhere to three main principles: equality and balance, transparency, and mutual benefit. These principles support effective collaborative management, emphasizing synergy among stakeholders to achieve conservation objectives and community empowerment.

Keywords: Stakeholder; the Influence and Interests; the Pattern of Partnerships; Mount Tunak Nature Tourism Park.

ABSTRAK

Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai pelestarian dan pengembangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan (stakeholder), menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan mereka, serta mengkaji pola kemitraan dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan purposive sampling untuk menentukan responden. Analisis data dilakukan menggunakan analisis stakeholder untuk menilai peran dan hubungan antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan enam aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak, yaitu

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), Pemerintah Desa Mertak, dan Kelompok Tunak Besopoq. Dari analisis, BKSDA NTB dan KIFC memiliki pengaruh dan kepentingan yang sangat tinggi dalam pengelolaan, sementara Kelompok Tunak Besopoq berada pada tingkat tinggi. Di sisi lain, Dinas Pariwisata, Bappeda Lombok Tengah, dan Pemerintah Desa Mertak memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah. Pola kemitraan yang teridentifikasi meliputi tiga prinsip utama: kesetaraan dan keseimbangan, transparansi, serta manfaat bersama. Prinsip-prinsip ini mendukung pengelolaan kolaboratif yang efektif, dengan fokus pada peningkatan sinergi antara pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Stakeholder; Pengaruh dan Kepentingan; Pola Kemitraan; TWA Gunung Tunak.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dengan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pulau Lombok, dengan kekayaan alamnya yang mencakup pantai, gua, pegunungan, dan danau, menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun internasional. Salah satu daya tarik utama di Pulau Lombok adalah Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak, yang terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan ini memiliki nilai penting sebagai area pelestarian alam dengan kekhasan flora dan fauna yang menjadi magnet bagi pengunjung.

TWA Gunung Tunak telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Wisata berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.425/Kpts-II/1996. Status ini menegaskan peran strategis kawasan tersebut dalam mendukung konservasi lingkungan di Indonesia. Pengembangan ekowisata di TWA Gunung Tunak diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan pendapatan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat setempat (Beaumont, 2011).

Namun, pengelolaan TWA Gunung Tunak menghadapi tantangan besar, terutama dalam mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi, tekanan aktivitas pariwisata terhadap habitat alami, serta koordinasi yang belum optimal antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Sayangnya, peran dan kontribusi masing-masing stakeholder seringkali kurang terdefinisi dengan baik, yang berujung pada ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat lokal terhadap program pengembangan pariwisata. Kondisi ini menghambat tercapainya pengelolaan kawasan yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak, menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan mereka, serta mengkaji pola kemitraan yang terbentuk. Dengan memahami peran dan dinamika antar-stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi TWA Gunung Tunak.

METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala atau hubungan dalam suatu masyarakat dengan mempelajari masalah-masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan menyajikan data, menganalisis data dan

menginterpretasikan data dan kemudian ditarik kesimpulan (Rukajat, 2018). Metode deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengelolaan kawasan konservasi dengan keterlibatan stakeholder di TWA Gunung Tunak.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober s/d November tahun 2022 bertempat di Taman Wisata Alam Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah.

Objek dan Alat Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kawasan Konservasi TWA Gunung Tunak dengan unit analisis: BKSDA dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, kuisioner wawancara dan kamera untuk mendokumentasikan penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel

Responden ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang memungkinkan peneliti memilih individu dengan pengetahuan mendalam tentang pengelolaan kawasan TWA Gunung Tunak. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu: 1. Pihak yang mengetahui terkait pengelolaan TWA Gunung Tunak, dalam hal ini adalah BKSDA NTB. 2. Pihak yang mengelola TWA Gunung Tunak, dalam hal ini adalah Masyarakat Tunak Besopoq. Responden awal, atau responden kunci, meliputi pihak dari BKSDA NTB dan Masyarakat Tunak Besopoq. Selanjutnya, teknik snowball sampling digunakan untuk menentukan responden tambahan berdasarkan informasi dari responden awal.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, diantaranya yaitu: 1. Observasi. Observasi dilakukan dengan peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2018); 2. Wawancara Terstruktur. Menurut Sugiyono (2010; *cit. Wilinny, et.al., 2019*), wawancara terstruktur (*structured interview*) ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya; dan 3. Studi Pustaka. Studi pustaka adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi yang dicari berisi tentang Kawasan Wisata Alam Gunung Tunak (TWA) Gunung Tunak, dan stakeholder yang berperan dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak. Referensi ini dapat dicari melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah.

Variabel dan Indikator

Adapun variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian
Table 1 Research Variables

Tujuan	Variabel	Indikator
- Mengetahui stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	- Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	1. Adanya dokumen kerjasama antara stakeholder dengan TWA Gunung Tunak
- Mengetahui kepentingan dan pengaruh stakeholder	- Kepentingan masing-masing stakeholder yang	1. Persepsi model kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

Peran stakeholder dalam pengelolaan TWA... (Rahman et al)

Tujuan	Variabel	Indikator
dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak	terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	<ol style="list-style-type: none"> 2. Keterlibatan terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 3. Program terkait pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 4. Manfaat kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak bagi pemangku kepentingan 5. Ketergantungan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
	- Pengaruh masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan aspirasinya terkait kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 2. Kontribusi fasilitas yang diberikan terkait pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 3. Kapasitas kelembagaan/SDM yang ditugaskan dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 4. Dukungan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak 5. Kemandirian dalam pelaksanaan (Kebutuhan kerjasama) dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
- Mengetahui pola kemitraan dalam pengembangan kawasan TWA Gunung Tunak.	- Kesetaraan dan Keseimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling menghormati dan mempercayai 2. Adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan
	- Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi 2. Pengelolaan keuangan
	- Saling menguntungkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa manfaat bagi semua pihak

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu menggunakan analisis stakeholder sebagai instrument analisis utama. Analisis stakeholder merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kuncinya atau stakeholdernya di dalam sistem tersebut, dan menilai kepentingan ekonomi mereka masing-masing di dalam sistem itu (Suporahardjo, 2005).

1. Identifikasi Stakeholder Terlibat

Penelitian ini menggunakan analisis stakeholder sebagai instrument analisis utama untuk mengidentifikasi stakeholder terlibat. Analisis stakeholder merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kuncinya atau stakeholdernya di dalam sistem tersebut, dan menilai kepentingan ekonomi mereka masing-masing di dalam sistem itu (Suporahardjo, 2005). Stakeholders atau pemangku kepentingan dalam penelitian ini merupakan Pemerintah, Swasta, dan Organisasi yang mengelola TWA Gunung Tunak. Untuk identifikasi aktor dapat menggunakan Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Identifikasi Aktor Terlibat dan Peran dalam Pengelolaan
Table 2. Identification of Actors Involved in the Management and their Roles

Aktor	Peran
A	
B	
C	

2. Analisis Kepentingan dan Pengaruh

Analisis Kepentingan dan Pengaruh aktor yang terlibat mengacu pada Tabel 3 dan Tabel 4 menurut (Reed *et al.*, 2009). Adapun kegunaan dari Tabel 3 di bawah ini yaitu untuk mengetahui kepentingan dari setiap aktor aktor yang terlibat dalam stakeholder.

Tabel 3. Tingkat Kepentingan Aktor dalam Ekowisata
Table 3. Actors' Level of Importance in Ecotourism

No	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Kepentingan (<i>Interest</i>)					Nilai (<i>Value</i>)
		K1	K2	K3	K4	K5	

Keterangan:

- K1 = Pemahaman akan konteks nilai-nilai penting yang dimiliki dari kawasan konservasi;
- K2 = Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi;
- K3 = Kontribusi fasilitas pendukung yang diberikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi;
- K4 = Program pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi;
- K5 = Manfaat yang diterima pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi

Adapun kegunaan dari Tabel 4 di bawah ini yaitu untuk mengetahui kemampuan pengaruh pemangku kepentingan dalam stakeholder.

Tabel 4. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam Ekowisata
Table 4. Stakeholders' Level of Influence in Ecotourism

No	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Pengaruh (<i>Power</i>)					Nilai (<i>Value</i>)
		P1	P2	P3	P4	P5	

Keterangan:

- P1= Kewewenangan pemangku kepentingan menentukan peluang pengelolaan kawasan konservasi;
- P2= Kewewenangan pemangku kepentingan membuat rencana pengelolaan kawasan konservasi;
- P3= Kapasitas SDM yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan pengelolaan kawasan konservasi;
- P4= Kontribusi pemangku kepentingan dalam menentukan kesesuaian antara kegiatan dengan standar yang bisa diterima dalam pengelolaan kawasan konservasi;
- P5= Keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengelola produk dan jasa yang dihasilkan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Analisis data mengadopsi dari Roslinda *et al.* (2012). Penetapan skoring dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan, pengukuran data dengan menggunakan lima gradasi yang disajikan pada Tabel 5. Nilai skor dari lima pertanyaan dijumlahkan nilainya kemudian dipetakan kedalam bentuk matrik.

Tabel 5. Analisis Skoring Kepentingan dan Pengaruh
Table 5. Scoring Analysis of Importance and Influence

Skor (<i>Score</i>)	Nilai (<i>Value</i>)	Kriteria (<i>Criteria</i>)	Keterangan (<i>Information</i>)
Tingkat Kepentingan Stakeholder			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat berkepentingan dalam pengembangan TWA Gunung Tunak
4	16-20	Tinggi	Berkepentingan pengembangan TWA Gunung Tunak
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup berkepentingan pengembangan obyek wisata TWA Gunung Tunak

Peran stakeholder dalam pengelolaan TWA... (Rahman et al)

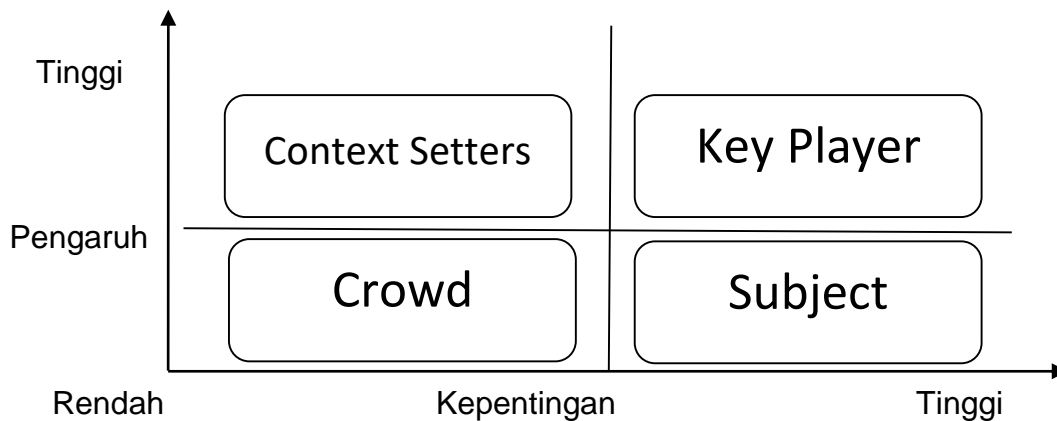
Skor (Score)	Nilai (Value)	Kriteria (Criteria)	Keterangan (Information)
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang berkepentingan dalam pengembangan TWA Gunung Tunak
1	0-5	Rendah	Tidak Berkepentingan dalam pengembangan TWA Gunung Tunak
Tingkat Pengaruh Stakeholder			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat berpengaruh dalam pengembangan TWA Gunung Tunak
4	16-20	Tinggi	Berpengaruh dalam pengembangan TWA Gunung Tunak
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup Berpengaruh Pengembangan TWA Gunung Tunak
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang Berpengaruh dalam pengembangan TWA Gunung Tunak
1	0-5	Rendah	Tidak Berpengaruh dalam pengembangan TWA Gunung Tunak

Sumber (Source): Roslinda *et al.* (2012).

3. Analisis Klasifikasi (Reed *et al.*, 2009)

Merujuk kepada Reed *et al.* (2009), para pihak diklasifikasikan sebagai *key player*, *context setter*, *subject*, dan *crowd*. Penjelasan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Subjects* (Kuadran I) merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.
- *Key players* (Kuadran II) merupakan stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
- *Crowd* (Kuadran III) merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.
- *Context setters* (Kuadran IV) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan, oleh karena itu mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau.



Gambar 1. Kuadran Analisis Klasifikasi (Reed *et al.*, 2009)
 Figure 1. Classification Analysis Quadrant

4. Pola Kemitraan Stakeholder

Metode analisis data untuk pola kemitraan stakeholder menggunakan analisis kualitatif. Menurut Siyoto & Sodik (2015) metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pola kemitraan dalam pengembangan kawasan TWA Gunung Tunak dapat diperoleh melalui Teori Kemitraan menurut Wibisono (2007) yaitu Kesetaraan dan Keseimbangan, Transparansi dan Saling menguntungkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Stakeholder Dalam Pengelolaan Ekowisata TWA Gunung Tunak

Klasifikasi stakeholders dalam konteks pengelolaan ekowisata TWA Gunung Tunak, dibagi menjadi 3 kategori. Pembagian ini mengacu pada pendapat Maryono *et al.* (2005 *cit.* Handayani & Warsono, 2017), yang membagi stakeholders menjadi 3 sebagai berikut:

1. Stakeholder Primer

Stakeholder primer yaitu stakeholder yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari perencanaan yang dibuat serta memiliki kepentingan secara langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

2. Stakeholders Kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan legal terkait pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini stakeholder kunci adalah stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

3. Stakeholders Sekunder atau Pendukung

Stakeholder sekunder atau pendukung yaitu stakeholder yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perencanaan tetapi memiliki kepedulian yang besar terkait proses pengelolaan. Stakeholder pendukung merupakan fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Dari hasil identifikasi, stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program kemitraan sebanyak enam aktor dengan bentuk keterlibatan masing-masing serta kategori stakeholder seperti yang tercantum dalam Tabel 6 dan peran masing-masing aktor yang dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Analisis Skoring Kepentingan dan Pengaruh

Table 6. Scoring Analysis of Importance and Influence

Aktor	Bentuk Keterlibatan	Kategori
Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)	<ol style="list-style-type: none"> Mengawasi dan Mendampingi segala bentuk kegiatan pengelolaan Membantu pengambil keputusan dalam pengelolaan Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang. Mengurus izin jasa di dalam dan di luar kawasan Melatih dan mengembangkan kapasitas masyarakat Memberikan fasilitas dalam pengelolaan Membantu dan memberikan anggaran 	Stakeholder Kunci
Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitas dalam pengelolaan Memberikan anggaran dalam pembangunan akses 	Stakeholder Sekunder atau Pendukung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitas dalam pengelolaan Memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan 	Stakeholder Sekunder atau Pendukung
Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitas dalam pengelolaan Menyusun perencanaan kerja (Workplan) Memberikan pelatihan kepada masyarakat Memberikan bantuan pendanaan Membantu memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kedua negara 	Stakeholder Primer
Pemerintah Desa Mertak	-	Stakeholder

Aktor	Bentuk Keterlibatan	Kategori
		Sekunder atau Pendukung
Kelompok Tunak Basopoq	1. Membantu pengambil keputusan dalam pengelolaan 2. Memberikan fasilitas dalam pengelolaan 3. Membantu dan memberikan anggaran	Stakeholder Sekunder atau Pendukung

Berdasarkan hasil identifikasi, stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program kemitraan terdapat sebanyak tiga pihak sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

1. Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)

Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu kawasan yang masuk dalam pengelolaan BKSDA NTB adalah Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki fungsi untuk menjaga dan mempertahankan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan serta keutuhan kawasan dengan cara mengembangkan pariwisata. Banyak peran dari Balai Konservasi Sumber Daya dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak seperti membantu dalam pengambilan keputusan pengelolaan, mengawasi dan mendampingi segala bentuk kegiatan pengelolaan dengan menugaskan beberapa petugas. Selain itu juga berperan dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pengelolaan serta mengurus izin jasa di dalam maupun diluar kawasan dan juga memberikan fasilitas yang cukup dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Dinas pariwisata merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Dinas Pariwisata tidak memiliki peran yang banyak dan pengaruh. Dinas Pariwisata hanya berperan dalam memberikan fasilitas pendukung berupa pembuatan parkir, mushola, gazebo, sumur bor dan penataan landscape yang bergantung berdasarkan anggaran yang ada. Selain itu, Dinas Pariwisata memberikan dukungan anggaran pembangunan akses yang dilakukan hanya sekali.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah organisasi pemerintah yang berada di bawah Kepala Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerahnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi perencanaan dan penyusunan rencana kerja pemerintah jangka panjang, penetapan plafon anggaran sementara (PPAS), serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sedikit sama halnya dengan Dinas Pariwisata. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan yang menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya berperan dalam memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan serta memberikan fasilitas berupa amenities (toilet) serta anggaran untuk membangun jalan yang dilakukan hanya diawal pembangunan.

4. Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)

Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) adalah organisasi di bawah Korea Forest Service (KFS) Republik Korea dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan Korea-

Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC). Kerjasama kehutanan bersama Indonesia, serta untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama kehutanan antara kedua Negara yang salah satunya adalah pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Korea-Indonesia Forest Cooperation Center memiliki peran keterlibatan yang banyak dalam proses pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang bertujuan untuk memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama bilateral kedua negara antara lain memberikan 95% fasilitas untuk pengelolaan. Pemberian anggaran dana, membangun infrastruktur, restaurant, guest house, butterfly zone dan memberikan pelatihan kepada masyarakat merupakan bagian dari workplan yang disahkan dan dibuat Korea-Indonesia Forest Cooperation Center yang dijalankan secara bertahap berdasarkan projek proposal.

5. Pemerintah Desa Mertak

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Mertak tidak memiliki peran dan keterlibatan penting dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Hal ini tercermin dari ketiadaan program, fasilitas, dan anggaran dana yang disediakan untuk pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Akan tetapi Pemerintah Desa Mertak mengharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan serta mengembangkan kualitas SDM yang ada.

6. Kelompok Masyarakat Tunak Basopog

Dalam melaksanakan kerjasama, Kelompok Tunak Basopo memiliki keterlibatan dalam pengelolaan yaitu melakukan kerjasama dengan para stakeholder yang ada untuk menjaga kelestarian hutan dan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok Tunak Basopo berperan dalam membantu pengambilan keputusan dan menyampaikan ide serta gagasan dalam pengelolaan seperti penjualan jasa wisata (guiding) meskipun tidak terlalu besar karena masih dibawah wewenang BKSDA NTB. Memberikan kontribusi berupa pembangunan restaurant, toilet, listrik, air, parkir, mushola maupun penambahan atraksi wisata serta memberikan dukungan anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan serta pembangunan berkelanjutan kawasan. Hasil anggaran didapatkan dari hasil penjualan paket wisata, restaurant dan guiding.

Menurut Nugroho (2014 *cit.* Handayani & Warsono, 2017), berdasarkan peranannya stakeholder dibagi menjadi 5 kelompok yaitu:

1. Policy creator merupakan aktor/stakeholder yang berperan dalam pengambilan keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator merupakan aktor/stakeholder yang berperan dalam mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
3. Fasilitator merupakan aktor/stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi segala hal yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementer merupakan aktor/stakeholder yang berperan sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator merupakan aktor/stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Tabel 7. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
Table 7. The Role of Stakeholders in the Management of Gunung Tunak Nature Tourism Park

Role				
Policy Creator	Coordinator	Facilitator	Implementer	Accelerator
BKSDA	BKSDA	BKSDA	BKSDA	BKSDA

Role				
Policy Creator	Coordinator	Facilitator	Implementer	Accelerator
		DISPAR LOTENG		
		BAPPEDA LOTENG		
		KIFC	KIFC	KIFC
		KM TB	KM TB	

Keterangan:

BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
DISPAR LOTENG	: Dinas Pariwisata Lombok Tengah
BAPPEDA LOTENG	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah.
KIFC	: Korea – Indonesia Forest Cooperation Center
KM TB	: Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq

2. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Stakeholder adalah orang-orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam suatu sistem. Setiap aktor yang terlibat dalam program kemitraan ini memiliki nilai tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut.

Tabel 8. Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Table 8. The Importance Level of Stakeholders in the Management of Gunung Tunak Nature Tourism Park

No	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Kepentingan (<i>Interest</i>)					Nilai (<i>Value</i>)
		K1	K2	K3	K4	K5	
1	Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)	5	5	4	5	5	24
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	5	1	1	4	1	12
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah	5	1	3	4	1	14
4	Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)	5	4	5	5	5	24
5	Pemerintah Desa Mertak	5	1	1	2	1	10
6	Kelompok Masyarakat Tunak Basopo	5	5	4	5	1	20

Keterangan:

K1	= Persepsi pentingnya pelaksanaan kemitraan konservasi;
K2	= Keterlibatan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kemitraan konservasi;
K3	= Program pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kemitraan konservasi;
K4	= Manfaat kemitraan konservasi bagi pemangku kepentingan;
K5	= Ketergantungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kemitraan konservasi.

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa dari jumlah aktor-aktor yang dilakukan wawancara mengenai pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak memiliki masing-masing bentuk persepsi, keterlibatan, program, manfaat dan ketergantungan yang diterima oleh masing-masing aktor. Untuk mengetahui secara detail mengenai tingkat kepentingan masing-masing aktor yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 7 di atas.

Berdasarkan hasil dari analisis kepentingan dari masing-masing aktor, diketahui bahwa dalam pengelolaan selama ini, Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) memiliki kepentingan dengan kriteria sangat tinggi dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Olat Gunung Tunak. Tingkat kepentingan dari Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) memiliki nilai skor 24. Hal ini didasari oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Tenaga Ahli dan Manager Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) yang menyebutkan bahwa dari segi keterlibatan, Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) sangat

terlibat dalam pengelolaan dengan bentuk keterlibatan berupa pembuatan SK yang berisi izin pemanfaatan jasa baik di dalam maupun di luar kawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) diketahui bahwa pelaksanaan kerjasama ini mencakup hubungan antara Korea dan Indonesia. Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dari segi keterlibatan termasuk dalam kategori terlibat dengan bentuk keterlibatan dan program berupa fasilitas outdoor, infrastruktur, restaurant, guest house, butterfly zone, penyusunan rencana kerja (workplan), pelatihan pada masyarakat dan memberikan bantuan anggaran dana dengan jangkauan program yaitu masyarakat, kedua Negara dan wisatawan.

Pemerintah Desa Mertak merupakan aktor dengan kriteria tingkat kepentingan kurang tinggi atau kurang penting dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dengan nilai skor 10. Ini dikarenakan Pemerintah Desa Mertak tidak memiliki keterlibatan maupun program terkait dengan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Pemerintah Desa Mertak hanya mengharapkan dengan adanya kerjasama dengan masyarakat desa dapat membantu perekonomian serta pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat.

Tabel 9. Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak
Table 9. The Influence Level of Stakeholders in the Management of Gunung Tunak Nature Tourism Park

No	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Pengaruh (<i>Power</i>)					Nilai (<i>Value</i>)
		P1	P2	P3	P4	P5	
1	Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB)	5	5	3	4	4	21
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	1	5	1	3	1	11
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah	4	3	1	1	5	14
4	Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC)	5	5	4	5	5	24
5	Pemerintah Desa Mertak	1	1	3	1	1	7
6	Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq	4	3	3	3	3	16

Keterangan:

P1= Kemampuan pemangku kepentingan memperjuangkan aspirasinya terkait kerjasama;

P2= Kontribusi fasilitas yang diberikan oleh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kerjasama;

P3= Kapasitas kelembagaan/ SDM yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan terkait kerjasama;

P4= Dukungan anggaran pemangku kepentingan yang digunakan untuk kerjasama;

P5= Kebutuhan kerja sama dalam pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan hasil dari analisis pengaruh dari masing-masing stakeholder, diketahui bahwa dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) dan Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) memiliki pengaruh dengan kriteria sangat tinggi dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Tingkat pengaruh dari Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat memiliki nilai skor 21 sedangkan Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) memiliki nilai skor 24. Hal ini didasari oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Tenaga Ahli dan Manager Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat yang mengatakan bahwa informan Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat sangat berwenang dalam pengambilan keputusan menyampaikan ide dan gagasan, berwenang dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang berdasar pada SK yang telah ditetapkan. Selain itu juga memberikan kontribusi fasilitas berupa gedung, kamar hotel dan restoran yang dibangun oleh anggaran Negara maupun dana pihak ketiga yang dihibahkan ke negara yang tetap dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) diketahui bahwa Korea-Indonesia Forest Cooperation Center sangat berwenang dalam pengambilan keputusan, menyampaikan ide dan gagasan terkait pelaksanaan kerjasama. Adapun pengaruh dari segi kontribusi fasilitas dikatakan sangat banyak dimana semua fasilitas yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tunak 95% merupakan fasilitas yang telah diberikan oleh Korea-Indonesia Forest Cooperation Center. Dalam mendukung terlaksananya kerjasama telah ada SDM yang telah ditugaskan secara khusus untuk mengawal setiap proses yang dilakukan berjumlah 5 orang. Selain itu dukungan anggaran juga telah diberikan sebesar 4.000.000 USD atau senilai Rp. 60 miliar yang diperuntukkan untuk semua rencana kerja (workplan) yang telah disahkan dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan proyek proposal.

Pemerintah Desa Mertak merupakan aktor dengan kriteria tingkat pengaruh kurang tinggi atau kurang berpengaruh dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dengan nilai skor 7. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dari segi aspirasi, Pemerintah Desa Mertak sama sekali tidak berwenang dalam pengambilan keputusan, menyampaikan ide dan gagasan terkait pelaksanaan kerjasama sama halnya dari segi fasilitas yang diketahui tidak ada kontribusi apapun. Akan tetapi dari segi SDM terbilang cukup meskipun tidak banyak berpengaruh. Tidak adanya anggaran yang diberikan menjadi kriteria penentu rendahnya pengaruh Pemerintah Desa Mertak.

Adapun klasifikasi aktor-aktor dalam kepentingan dan pengaruh yang terlibat dalam pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 2 sebagai berikut:

Tabel 10. Klasifikasi Aktor dalam Kepentingan dan Pengaruh

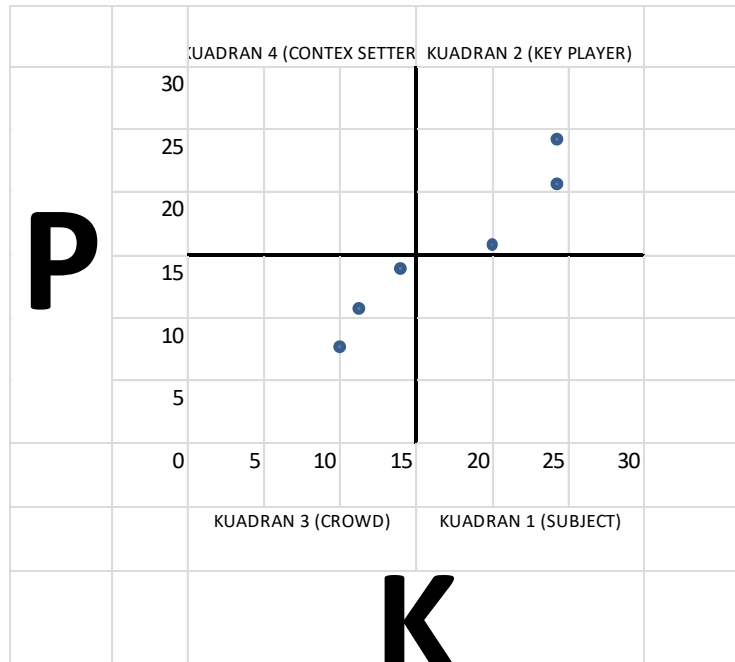
Table 10. Classification of Actors Based on Importance and Influence

No	Klasifikasi	Aktor/Stakeholder
1	K1 Subject	-
2	K2 Key Player	Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq (KMTB)
3	K3 Context Setter	-
4	K4 Crowd	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah (BAPPEDA) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (DISPAR) Pemerintah Desa Mertak (PEMDES)

Tabel 11. Nilai Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Table 11. The Importance and Influence Scores of Stakeholders

No	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Nilai	
		Kepentingan	Pengaruh
1	BKSDA NTB	24	21
2	DISPAR	12	11
3	BAPPEDA	14	14
4	KIFC	24	24
5	PEMDES	10	7
6	KMTB	20	16



Gambar 2. Kuadran Klasifikasi Aktor dalam Kepentingan dan Pengaruh
 Figure 2. Quadrant Classification of Actors Based on Importance and Influence

Berdasarkan Gambar 2 matriks kuadran klasifikasi aktor dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak dapat diketahui bahwa klasifikasi aktor terbagi dalam 2 kuadran yaitu kuadran II (key player) dan kuadran III (crowd). Pada keenam pihak mitra yang terlibat, diketahui bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopog masuk dalam kategori key player, dimana kategori ini menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopog memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam hal kewenangan dan tanggungjawab yang besar serta menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan program kerjasama ini. Menurut Kuswandono (2010), key player memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suksesnya suatu kegiatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Kuadran crowd merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Aktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak. Ini disebabkan karena ketiga stakeholder ini tidak memiliki ketergantungan pada kerjasama ini, hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya program yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan. Dari segi pengaruhpun ketiga stakeholder ini tergolong sangat rendah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pihak pada posisi key players lebih banyak terlibat dibandingkan para pihak yang terdapat pada posisi crowd (Nugroho, 2016). Lastiantoro & Cahyono, (2015) menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi para pihak menentukan besarnya pengaruh dan kepentingan institusi.

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa pada masing-masing pemangku kepentingan memiliki hubungan berdasarkan kuadran yang ditempati. Pada kuadran II yaitu key players diketahui

bahwa ada tiga pemangku kepentingan yang mengisinya yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dan Kelompok Masyarakat Tunak Besopoq. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa ketiga pihak ini memiliki hubungan kerjasama dan saling mengisi dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM masyarakat sekitar kawasan. Ketiga pihak mitra ini merupakan satakeholder kunci atau pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumberdaya dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Selain itu, ketiga pihak mitra ini dalam pola pengelolaan termasuk sebagai fasilitator antara masyarakat dan Taman Wisata Alam, investor dalam penyusunan pendanaan, dan sebagai evaluator dari hasil kerjasama. Sedangkan untuk kuadran III (crowd) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Mertak memiliki hubungan dalam pengelolaan hanya sebagai stakeholder pendukung atau pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung atau pihak yang hanya bergantung pada sebagian sumberdaya yang ada dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

3. Pola Kemitraan Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak

Pola kemitraan dalam pengembangan kawasan TWA Gunung Tunak menggunakan teori kemitraan dari Wibisono (2007), yang mencakup tiga dimensi utama: kesetaraan dan keseimbangan, transparansi, serta saling menguntungkan. Berikut penjelasan pola kemitraan pada penelitian ini:

a. Kesetaraan dan Keseimbangan

Saling Menghormati, Menghargai dan Percaya

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli dan Manajer Balai KSDA NTB, Bapak Rata Wijaya, diketahui bahwa Balai KSDA NTB menerapkan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagai bentuk rasa saling menghormati, menghargai, dan mempercayai antar pihak yang bekerjasama. Dengan prinsip keterbukaan ini semua stakeholder merasa nyaman bahkan ketika mereka memanfaatkan Taman Wisata Alam Gunung Tunak sebagai branding, Balai KSDA akan memfasilitasinya. Wawancara juga dilakukan dengan Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) yang mengungkapkan bahwa sebagai bentuk rasa menghormati, menghargai dan percaya, Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal ini karena kerjasama ini adalah kerjasama kedua Negara yang mewakili dua kementerian yakni KLHK (Indonesia) dan KFS (Korea). Selain itu Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) membantu dalam memberdayakan masyarakat sekitar kawasan guna meningkatkan kualitas SDM. Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq, Bapak Damar yang mengungkapkan bahwa kepercayaan Kelompok Masyarakat Tunaq Besopoq yaitu 100%. Hal ini dilakukan dengan cara setiap bulan melakukan laporan pendapatan dari hasil pengelolaan jasa wisata yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

Adanya Penghargaan, Kewajiban dan Ikatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilakukan dengan Tenaga Ahli dan Manajer Balai KSDA NTB, Bapak Rata Wijaya dapat diketahui bahwa bentuk penghargaan dari hasil pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak berupa local champion, sertifikat dan finansial. Selain itu, segala kewajiban dari Balai KSDA telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah tercantum dalam SK. Bentuk ikatan antar pihak yang bekerjasama berupa SK, PKS dan Kemitraan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak.

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) yang mengungkapkan bahwa bentuk penghargaan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak berupa adanya sertifikat penghargaan. Korea Forest Service (KFS) Republik Korea dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia telah melaksanakan kewajiban mereka secara bersama-sama. Selain itu, ikatan antar pemangku kepentingan dilakukan secara legal atau Pemerintah Korea dan Indonesia secara hukum yang terlibat adalah kedua kementerian namun dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat setempat, pemerintah provinsi dan daerah dengan membentuk sharing community.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Ketua Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq, Bapak Damar yang mengungkapkan bahwa ada beberapa penghargaan yang diperoleh berupa sertifikat, insentif, dan tambahan modal dalam pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Selain itu kewajiban juga sudah dilakukan dengan setiap bulan dilaporkan hasil kegiatan dan membayar PNBP. Sedangkan bentuk ikatan antar pemangku kepentingan berupa pola kemitraan dalam bentuk Surak Keputusan (SK) untuk bermitra dengan masyarakat dalam pengelolaan jawa wisata.

b. Transparansi

Pengelolaan Informasi

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli dan Manajer Balai KSDA NTB, Bapak Rata Wijaya, diketahui bahwa dalam mengelola dan menyampaikan informasi ke pihak lain, Balai KSDA NTB menggunakan laporan tertulis dan publikasi, baik secara online maupun offline. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) yang mengungkapkan bahwa dalam mengelola dan menyampaikan informasi ke pihak yang lain dilakukan dengan cara Social Network System (SNS), melalui event-event internasional, media sosial LHK dan juga melalui penelitian. Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Ketua Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq, Bapak Damar yang mengungkapkan bahwa dalam mengelola dan menyampaikan informasi ke pihak yang lain dilakukan melalui rapat baik itu rapat tahunan, rapat bulanan maupun rapat mingguan serta penyampaian laporan dari pihak pendamping.

Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tenaga Ahli dan Manajer Balai KSDA NTB, Bapak Rata Wijaya dapat diketahui bahwa melalui laporan bulanan dan laporan PNBO merupakan bentuk dan cara mengelola keuangan yang diperoleh dari hasil kerjasama. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) yang mengungkapkan bahwa melalui transparansi dan akuntabilitas yang menjadi cara mengelola keuangan yang diperoleh dari hasil kerjasama. Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Ketua Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq, Bapak Damar yang mengungkapkan bahwa bentuk dan cara mengelola keuangan yang diperoleh dari hasil kerjasama melalui transparansi keuangan dengan melaporkan keuangan setiap bulan.

c. Saling Menguntungkan

Membawa Manfaat bagi Semua Pihak

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli dan Manajer Balai KSDA NTB, Bapak Rata Wijaya, diketahui bahwa manfaat yang diterima dari hasil kerjasama ini adalah terjaganya kelestarian kawasan dan penurunan biaya operasional kawasan. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Korea – Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) yang mengungkapkan bahwa bagi KIFC telah menjadi salah satu bukti keberhasilan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea merupakan manfaat yang diterima. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan dengan Ketua Kelompok Masyarakat Tunak Basopoq, Bapak Damar, yang

mengungkapkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kerjasama ini adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tunak meliputi Balai Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), Pemerintah Desa Mertak, serta Kelompok Tunak Besopoq. Setiap aktor memiliki peran yang saling mendukung dalam pengelolaan kawasan ini.
2. BKSDA NTB dan KIFC memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sangat tinggi dalam pengelolaan TWA Gunung Tunak, dengan nilai skor kepentingan 24 dan skor pengaruh 21 serta 24. Kelompok Tunak Besopoq menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, dengan skor kepentingan 20 dan pengaruh 16. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah serta Bappeda Lombok Tengah memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang cukup tinggi, dengan skor kepentingan 12 dan 14 serta skor pengaruh 11 dan 14. Sementara itu, Pemerintah Desa Mertak menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih rendah dengan skor 10 dan 7.
3. Terdapat tiga pola kemitraan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini, yaitu pola kesetaraan dan keseimbangan, transparansi, serta saling menguntungkan. Pola kesetaraan dan keseimbangan ditandai dengan adanya rasa saling menghargai, keterbukaan, kepercayaan, serta penghargaan, kewajiban, dan ikatan antara pihak mitra. Pola transparansi tercermin dalam pengelolaan informasi dan keuangan yang jelas dan terbuka. Sedangkan pola saling menguntungkan terlihat dari manfaat yang diperoleh oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beaumont, N. 2011. The Third Criterion of Ecotourism: Are Ecotourists More Concerned About Sustainability Than Other Tourists. *Journal of Ecotourism*. 10(2): 135-148.
- Handayani, F., & Warsono, H. 2017. Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 6(3): 1-13.
- Lastiantoro, C.Y., & Cahyono, S.A. 2015. Analisis Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hulu. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(3): 203-212.
- Nugroho, A.S. 2016. E-Commerce Teori dan Implementasi. Ekuilibria. Yogyakarta.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., & Stringer, L.C. 2009. Who's In and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*. 90(5):1933-1949.
- Roslinda, E., Darusman, D., Suharjito, D., & Nurrochmat, D.R. 2012. Analisis Pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 18(2): 78-85.

- Rukajat, A. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif. Deepublish. Yogyakarta.
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Suporahardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Penerjemah: Assagaf, M., Trajudi, D., Sileuw, I., Djatmiko, W.A., Sumarno, A.: Pustaka Latin. Bogor.
- Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Gresik.
- Wilinny, Halim, C., Sutarno, Nugroho, N., & Hutabarat, F.A.M. 2019. Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan. *Jurnal Ilmiah Simantek*: 3(1):1-6.